



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI SMK 6 KOTA SAMARINDA

Juliana Hasibuan¹, Ratno Adrianto², Nur Rohmah³, Ike Anggraini G⁴, Irfansyah Bahruddin Pakki⁵, Ayu Indira Dwika Lestari⁶

¹Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

²Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

³Departemen Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

⁴Departemen Biostatistik dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

⁵Departemen Epidemiologi Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

⁶Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

hasibuanjuliana663@gmail.com

Abstrak

Indonesia menghadapi peningkatan jumlah perokok aktif, khususnya pada usia remaja. Upaya dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif asap rokok, Pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMK Negeri 6 Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling dengan jumlah responden sebanyak 278 siswa. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner, dan analisis data dilakukan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh langsung antara komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi terhadap implementasi kebijakan (masing-masing *p*-value = 0,000). Selain itu, komunikasi juga berpengaruh langsung terhadap sumber daya (*p*-value = 0,000), dan struktur birokrasi berpengaruh langsung terhadap disposisi (*p*-value = 0,000). Terdapat pula pengaruh tidak langsung antara komunikasi terhadap implementasi melalui sumber daya (nilai Sobel test = 6,132 > *t* tabel = 1,969) dan struktur birokrasi terhadap implementasi melalui disposisi (nilai Sobel test = 8,625 > *t* tabel = 1,969). Disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh pada penelitian ini yaitu variabel disposisi., komunikasi perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang rutin dan menarik

Kata kunci: *Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok, Remaja, Sekolah, Rokok*

Abstract

*Indonesia is currently facing a growing number of active smokers, particularly among adolescents. In an effort to protect the public from the negative impacts of cigarette smoke, the Government has established a Smoke-Free Area (KTR) policy. This study aims to analyze the factors influencing the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Smoke-Free Areas (KTR) at SMK Negeri 6 Samarinda. This research employed a quantitative approach with a cross-sectional design. The sampling technique used was stratified random sampling, involving 428 student respondents. Data were collected using a questionnaire, and analyzed using path analysis with the help of SPSS software. The results show a direct influence of communication, bureaucratic structure, resources, and disposition on policy implementation (each with a *p*-value = 0.000). Furthermore, communication had a direct effect on resources (*p*-value = 0.000), and bureaucratic structure had a direct effect on disposition (*p*-value = 0.000). An indirect effect was also found between communication and implementation through resources (Sobel test value = 6.132 > *t*-table = 1.969), as well as between bureaucratic structure and implementation through disposition (Sobel test value = 8.625 > *t*-table = 1.969). In conclusion, communication, resources, bureaucratic structure, and disposition are key factors influencing the implementation of Regional Regulation No. 8 of 2017 on Smoke-Free Areas in the school environment. communication needs to be improved through regular and interesting socialization.*

Keywords: *Implementation, Smoke-Free Areas, Adolescents, School, Smoking*

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2025

✉ Corresponding author :

Address : Samarinda

Email : hasibuanjuliana663@gmail.com

Phone : 082251840826

PENDAHULUAN

Merokok menjadi salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan di seluruh dunia, yang menyebabkan kematian (Yuri et al., 2022) dan salah satu faktor risiko penyebab tingginya angka kematian perokok pasif di dunia (Rohmah et al., 2023). *World Health Organisation* memperkirakan lebih dari 8 juta orang di seluruh dunia setiap tahun (WHO, 2020). Jumlah perokok di dunia mencapai 34,5% dari populasi global, yang menunjukkan bahwa merokok masih menjadi kebiasaan yang luas di berbagai Negara. Yang mana India menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah perokok aktif terbesar di dunia, diikuti oleh Tiongkok dan Indonesia. Perokok di Indonesia terus meningkat sehingga kebiasaan merokok ini sulit untuk di kendalikan, dan menjadi masalah kesehatan di Indonesia (Agustina & Nasrullah, 2020).

Dari jumlah tersebut kelompok usia 15-19 tahun merupakan perokok terbanyak dengan presentase 56,5%, selanjutnya kelompok usia 10-14 tahun sebesar 18,4%. Dari data tersebut Indonesia di hadapi dengan pertumbuhan perokok aktif terus meningkat, terutama pada usia remaja (Kemenkes, 2023). Kota Samarinda menempati peringkat ke-2 tertinggi setelah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan jumlah prevalensi perilaku merokok sebesar 17,94% pada kelompok usia 15-24 tahun (BPS Kaltim, 2024). Setiap tahunnya, jumlah penduduk di Kota Samarinda terus mengalami peningkatan, dipengaruhi oleh faktor urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, serta daya tarik kota sebagai pusat perdagangan dan industri (BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024).

Pemerintah berusaha mengatasi dampak negatif rokok dengan membatasi ruang gerak perokok di berbagai lokasi serta fasilitas umum (K. D. Putri & Rusli, 2021). bahkan, Pemerintah juga memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk menerapkan Kebijakan pembatasan merokok sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah (Fauziyah, 2021). Upaya dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif asap rokok, Pemerintah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pemerintah Kota Samarinda

kemudian menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok. Kebijakan ini dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kota Samarinda sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat (Perda Kota Samarinda, 2017). Salah satu kawasan yang termasuk dalam aturan ini adalah Institusi Pendidikan, yang memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dan sehat dari asap rokok. Kota Samarinda masih menghadapi masalah tingginya jumlah perokok di kalangan remaja. Data perokok usia <18 tahun berdasarkan data Puskesmas diambil dari siswa pelajar di Kota Samarinda menunjukan 3 Puskesmas Tertinggi yaitu pertama Puskesmas Bengkuring dengan 447 perokok (65%), Puskesmas Lempake dengan 72 perokok (10,48%), Puskesmas Pasundan dengan 55 perokok (8%). Tingginya angka ini mencerminkan masih maraknya kebiasaan perilaku merokok di kalangan pelajar, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Bengkuring (Dinkes, 2023).

Berdasarkan data dari Puskesmas Bengkuring, SMK Negeri 6 Samarinda merupakan sekolah dengan jumlah siswa perokok tertinggi di wilayah kerja Puskesmas tersebut yakni sebanyak 161 siswa. SMK Negeri 6 Samarinda menjadi fokus penting dalam penelitian ini karena siswa SMK berada dalam rentang usia remaja (15–18 tahun), yang memiliki prevalensi merokok tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya (Puskesmas, 2023).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dengan desain penelitian *cross-sectional*. adapun variabel dalam penelitian ini yaitu, variabel independen (eksogen), variabel dependen (endogen), serta variabel intervening (Z). Populasi penelitian penelitian adalah seluruh siswa di SMK 6 Kota Samarinda berjumlah 1.006 Siswa. Besaran sampel penelitian ini di tentukan dengan menggunakan rumus menurut Lemeshow. jumlah sampel sebanyak 278,20 yang kemudian dibulatkan menjadi 278 responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan Stratified Random Sampling. Melalui teknik ini, data jumlah siswa dari setiap kelas terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian ditentukan proporsi jumlah sampel yang diambil dari masing-masing strata (kelas) dengan total sampel yang

dibutuhkan. analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis jalur (*path analysis*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1 Distribusi Karakteristik Responden

| Karakteristik Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase (%) |
|--------------------------------|--------|----------------|
| Laki-laki | 228 | 80,94% |
| Perempuan | 53 | 19,06% |
| Usia | | |
| 15 | 46 | 16,55 |
| 16 | 80 | 28,77 |
| 17 | 78 | 28,05 |
| 18 | 56 | 20,15 |
| 19 | 18 | 6,48 |
| Kelas | | |
| 10 | 103 | 37,05 % |
| 11 | 71 | 25,55 % |
| 12 | 83 | 29,85 % |
| 13 | 21 | 7,55 % |
| Status Merokok | | |
| Merokok | 37 | 13,30 % |
| Tidak merokok | 241 | 86,7% |

Berdasarkan Tabel 1 diatas mayoritas responden dari penelitian ini berjenis kelamin laki-laki Sebanyak 80,94% atau 228 responden yang mengisi kuesioner adalah laki-laki. Sebaliknya, sebanyak 19,06% atau 53 orang yang mengisi kuesioner adalah perempuan. Dari karakteristik usia bahwa, usia 15 tahun berjumlah 46 responden dengan presentase (16,55 %), usia 16 tahun berjumlah 80 responden dengan presentase (28,77%), usia 17z tahun responden berjumlah 78 responden dengan presentase (28,05 %), usia 18 tahun berjumlah 56 responden dengan presentase (20,15 %), usia 19 tahun berjumlah 18 responden dengan presentase (6,48 %). jumlah perkelas yaitu:

kelas 10 berjumlah 103 siswa dengan presentase (37,05 %), kelas 11 berjumlah 71 responden dengan presentase (25,55 %), kelas 12 berjumlah 83 responden dengan presentase (29,85 %), kelas 13 berjumlah 21 responden dengan presentase (7,55 %). Dapat dilihat bahwa jumlah responden dari penelitian ini dilihat dari karakteristik status merokok yang merokok berjumlah 37 siswa dengan presentase (13,30 %). Tidak merokok berjumlah 241 dengan presentase (86,7%).

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi linier berganda (Ghozali, 2018). Hasil analisisnya sebagai berikut :

a. Koefien Jalur Model Regresi Pertama

Tabel 2 Model Regresi Pertama

| Variabel independent | Koefisien Regresi | T _{hitung} | Sig |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Komunikasi | 0,178 | 3,687 | 0,000 |
| Struktural Birokrasi | 0,189 | 3,638 | 0,000 |
| Sumberdaya | 0,211 | 4,418 | 0,000 |
| Disposisi | 0,411 | 9,040 | 0,000 |
| Variabel Dependent | Implementasi KTR | | |
| R ² | 0,173 | | |
| F _{hitung} | 179,972 | | |
| t _{tabel} | 0,1960 | | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nilai Probabilitas | 0,000 |
| Persamaan Jalur: Persamaan Jalur: 0,178 X1 +0,189X2 + 0,211X3 +0,411X4 | |

Hasil analisa diperoleh nilai F_{hitung} 172,972 dengan nilai probabilitas 0,000 lebih dari 0,05. Dengan demikian model ini menjelaskan pengaruh variabel komunikasi, struktur birokrasi, sumberdaya dan disposisi terhadap implementasi KTR. Pada keempat variabel tersebut memberi kontribusi sebesar 17,3% ($R^2 = 0,173$) terhadap implementasi KTR. Selanjutnya hasil uji persial (uji t) dapat diketahui komunikasi berpengaruh

langsung terhadap implementasi KTR dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,000 < 0,05$. Struktur birokrasi berpengaruh langsung terhadap implementasi KTR dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,000 < 0,05$. sumberdaya berpengaruh langsung terhadap implementasi KTR dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,000 < 0,05$. Disposisi berpengaruh langsung terhadap implementasi KTR dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,000 < 0,05$

b. Koefisien Jalur Model Regresi Kedua

Tabel 3. Model Regresi Kedua

| Variabel independent | Koefisien Regresi | T _{hitung} | Sig |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Komunikasi | 0,569 | 12,320 | 0,000 |
| Variabel Dependen | sumberdaya | | |
| R ² | 0,352 | | |
| F _{hitung} | 151,774 | | |
| t _{tabel} | 0,1960 | | |
| Nilai probabilitas | 0,000 | | |
| Persamaan Jalur: 0,569 Z1 | | | |

Hasil analisa diperoleh nilai F_{hitung} 151,774 dengan nilai probabilitas 0,000 lebih dari 0,05. Dengan demikian model ini menjelaskan pengaruh variabel komunikasi terhadap sumberdaya. Pada variabel tersebut memberi kontribusi sebesar 35,2 ($R^2 = 0,352$)

terhadap sumberdaya. Selanjutnya hasil uji persial (uji t) dapat diketahui komunikasi berpengaruh langsung terhadap sumberdaya dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,000 < 0,05$.

c. Koefisien Jalur Model 3

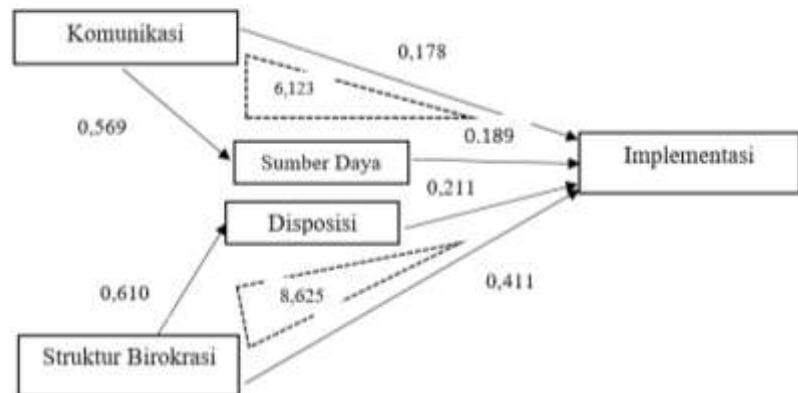
Tabel 4. Model Regresi Ketiga

| Variabel independent | Koefisien Regresi | T _{hitung} | Sig |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Struktur birokrasi | 0,610 | 12,781 | 0,000 |
| Variabel Dependen | Disposisi | | |
| R ² | 0,370 | | |
| F _{hitung} | 163,354 | | |
| t _{tabel} | 0,1960 | | |
| Nilai probabilitas | 0,000 | | |
| Persamaan Jalur: 0,610 Z2 | | | |

Hasil analisa diperoleh nilai F_{hitung} 163,354 dengan nilai probabilitas 0,000 lebih dari 0,05. Dengan demikian model ini menjelaskan pengaruh variabel struktur birokrasi terhadap disposisi. Pada

variabel tersebut memberi kontribusi sebesar 37,0 ($R^2 = 0,370$) terhadap disposisi. Selanjutnya hasil uji persial (uji t) dapat diketahui struktur birokrasi berpengaruh langsung terhadap disposisi dengan nilai probabilitasnya sebesar $0,000 < 0,05$

Hasil Analisis Jalur (*Path Analysis*)



Keterangan :

Garis lurus (→) : Pengaruh langsung

Garis Putus-putus (- - - →) : pengaruh tidak langsung

Gambar 1. Model Penelitian

Pengaruh langsung Pengaruh langsung Komunikasi terhadap Implementasi KTR

Nilai koefisien jalur komunikasi terhadap implementasi adalah sebesar 0,178 dengan nilai signifikan 0,00 yang berarti H1 diterima. Nilai koefisien jalur positif (0,178) dan nilai signifikannya 0,05. Maka dari itu bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap implementasi KTR.

Penelitian ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang sejalan seperti (Teed et al., 2024), komunikasi dan edukasi yang jelas berpotensi meningkatkan dukungan, penerimaan dan keberhasilan terhadap kebijakan bebas asap rokok dari pemerintah, bisnis, lembaga, dan masyarakat. Faktor komunikasi mempengaruhi para pelaku kebijakan baik antara individu maupun organisasional dalam melaksanakan program kerja layanan kesehatan tradisional integrasi di puskesmas. (Riswandi, 2020). Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Grindle (dalam Widjianto, dkk, 2019:16) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh unsur lingkungan kebijakan yang mencakup tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan (Arif & Thaha, 2020).

Penelitian ini membuktikan bahwa komunikasi memiliki pengaruh langsung yang sangat penting terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terutama di sekolah, khususnya pada siswa. Metode yang digunakan Baik itu komunikasi yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Seperti melalui media sosial instagram atau media platform lainnya (Rohmah et al., 2023)

Pengaruh Langsung Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi KTR

Nilai koefisien jalur struktur birokrasi terhadap implementasi adalah sebesar 0,610 dengan nilai signifikan 0,00 yang berarti H2 diterima. Nilai koefisien jalur positif (0,610) dan nilai signifikannya 0,05. Maka dari itu bahwa struktur birokrasi berpengaruh positif terhadap implementasi KTR.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Suwarta, 2020), faktor struktur birokrasi berpengaruh terhadap efektivitas pembuatan KTP di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. Begitupun dengan penelitian (Nurlaela, 2020), yaitu Studi di Dinas Sosial Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa secara parsial struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi program, dan bersama variabel komunikasi, sumber daya, dan disposisi, struktur birokrasi mampu menjelaskan 76,5%

variabilitas keberhasilan implementasi Struktur Birokrasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan (Vanocy & Rafie, 2022).

Struktur birokrasi memiliki pengaruh besar terhadap implementasi kebijakan (Kasransyah, 2021). Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek utama, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, yang dalam implementasi kebijakan biasanya dituangkan dalam dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) (Husni, 2025).

Pengaruh Langsung Variabel Sumberdaya Terhadap Variabel Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Nilai koefisien jalur sumberdaya terhadap implementasi adalah sebesar 0,211 dengan nilai signifikan 0,00 yang berarti H4 diterima. Nilai koefisien jalur positif (0,211) dan nilai signifikannya 0,05. Maka dari itu bahwa sumberdaya berpengaruh positif terhadap implementasi KTR.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Kasransyah, 2021), bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sumber daya manusia dengan implementasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjar. karena dalam implementasi harus ditunjang oleh ketersediaan sumber daya (Raimah & Irawanto, 2020).

Informasi yang sesuai mengenai bagaimana perintah dilaksanakan, dan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan seperti gedung, peralatan, lahan dan persediaan (Riswandi, 2020). Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, fasilitas, informasi. (N. E. Putri et al., 2020) sumber daya manusia, fasilitas, informasi. (N. E. Putri et al., 2020).

Pengaruh langsung disposisi terhadap Implementasi KTR

Nilai koefisien jalur disposisi terhadap implementasi adalah sebesar 0,411 dengan nilai signifikan 0,00 yang berarti H4 diterima. Nilai koefisien jalur positif (0,178) dan nilai signifikannya 0,05. Maka dari itu bahwa sumberdaya berpengaruh positif terhadap implementasi KTR.

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu (Faturrahim, 2023), yang mana Disposisi pelaksana berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan Jogo Tonggo, dengan kontribusi sebesar 81,4% dalam model regresi linear berganda. Ini menegaskan pentingnya sikap dan kesiapan pelaksana dalam keberhasilan kebijakan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Fatimah, 2019), dimana variabel disposisi berpengaruh terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima sebesar 28,63%. penelitian yang telah dilakukan (Indriyani & Wahyono, 2019).

Disposisi pelaksana mencakup sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan (Suwarta, 2020). Disposisi yang positif, yaitu sikap yang mendukung dan komitmen yang tinggi, akan memperkuat pelaksanaan kebijakan sehingga implementasi KTR di sekolah dapat berjalan efektif dan tujuan kesehatan masyarakat tercapai.

Pengaruh tidak langsung antara variabel komunikasi terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui variabel sumber daya

Hasil perhitungan menggunakan Sobel test menunjukkan bahwa nilai statistik uji Sobel sebesar 6,1318, sedangkan nilai t tabel pada taraf signifikansi 5% adalah sebesar 1,969. Karena nilai t hitung (6,132) > t tabel (1,969), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan “Terdapat pengaruh tidak langsung antara variabel komunikasi terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui variabel sumber daya” diterima. Dengan demikian, variabel sumber daya terbukti berperan sebagai mediator yang signifikan dalam hubungan antara komunikasi dan implementasi kebijakan KTR.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hardiansyah, 2016), Komunikasi (X1) melalui sumber daya (X2) memiliki pengaruh positif terhadap investasi di kawasan Bintan (Y) dengan koefisien sebesar 37,413845. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan pada komunikasi sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan kenaikan investasi di kawasan Bintan sebesar 37,413845 Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Jaya et al., 2021), pengaruh tidak langsung komunikasi melalui sumber daya terhadap implementasi Upsus Siwab Kota Jambi adalah dsebesar 5,97%.

Hasil ini mendukung teori implementasi kebijakan Eddward III (1980) yang menyebut Bawa efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan ketersediaan sumber daya. Ketika komunikasi dilakukan dengan baik tetapi tidak ada tindak lanjut berupa penyediaan fasilitas, tenaga pelaksana, atau sistem kontrol, maka implementasi tetap akan gagal.

Pengaruh Tidak Langsung Antara Variabel struktur birokrasi Terhadap Implementasi KTR Melalui Variabel disposisi

Berdasarkan hasilperhitungan dengan uji Sobel, diperoleh nilai statistik sebesar 8,62460207 yang lebih besar dari nilai t tabel 1,969. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung antara struktur birokrasi terhadap implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui disposisi adalah signifikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Jaya et al., 2021), ada pengaruh tidak langsung birokrasi melalui disposisi terhadap implementasi program Upsus Siwab Kota Jambi adalah 3,91 %. Struktur organisasi yang dimaksud dalam konteks ini mencakup aspek-aspek seperti pembagian tugas yang jelas, keberadaan tim pelaksana khusus, serta tersedianya prosedur operasional standar (SOP) untuk pelaksanaan KTR. struktur organisasi sekolah tidak secara langsung memengaruhi implementasi KTR, melainkan melalui pengaruhnya terhadap disposisi pelaksana kebijakan.

Struktur yang kuat mendorong sikap pelaksana yang positif, yang pada akhirnya akan menciptakan implementasi kebijakan KTR yang lebih efektif di sekolah, termasuk dalam memengaruhi perilaku siswa sebagai target utama kebijakan ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan program SPSS dan dengan pemodelan melalui *Path Analysis* untuk menguji delapan hipotesis penelitian, maka dapat dapat disimpulkan bahwa hasil dari semua hipotesis terdapat pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Disarankan Dalam implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah, komunikasi perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang rutin dan menarik, penyediaan informasi tertulis di tempat strategis, serta penggunaan media digital agar mudah dipahami warga sekolah.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian ke sekolah lain atau jenjang pendidikan yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih menyeluruh. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau gabungan (mixed methods) juga dapat dipertimbangkan guna mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi KTR.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., & Nasrullah, A. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*. 2, 172–189. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487>
- Arif, A., & Thaha, R. M. (2020). Implementation Of Regional Regulation Of Maros Regency Number 11 Of 2014 Concerning No Smoking Area In The Regent's Office In Maros. *Enfermería Clínica*, 30(4), 265–268. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1130862120301947>
- BPS Kaltim. (2024). *Badan Pusat Statistik*.
- Dinkes. (2023). *Jumlah Perokok Perwilayah Puskesmas di Kota Samarinda*.
- Fatimah, A. S. (2019). Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Terhadap Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 137–156. <https://doi.org/10.25077/jakp.4.2.137-156.2019>
- Faturrahim, F. (2023). *Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Kebijakan Jogo Tonggo Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Kabupaten Cilacap* [Jenderal Soedirman]. <http://repository.unsoed.ac.id/id/eprint/22703>
- Fauziyah. (2021). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Perumnas Kota Makassar Tahun 2021. In *Fauziyah* (Vol. 75, Issue 17).
- Ghozali, I. (2018). *Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Universitas Dipenogoro.
- Hardiansyah, R. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Pulau Bintan Sebagai Free Trade Zone (Ftz) Terhadap Investasi Di Bintan. *Jurnal Benefita*, 1(3), 163. <https://doi.org/10.22216/jbe.v1i3.882>
- Husni. (2025). *Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP*

- Negeri 3 Sampolawa Kabupaten Buton Selatan.* 13(01), 28–39.
- Indriyani, S., & Wahyono, B. (2019). Penyedia Layanan terhadap Implementasi Program Inspeksi Visual dengan Asam Asetat. *Higeia (Journal of Public Health Research and Development)*, 3(1), 1–11.
- Jaya, B., Firmansyah, F., & Hoesni, F. (2021). Analisis Kebijakan Implementasi Upaya Khusus Sapi induk Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 263. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1323>
- Kasransyah, F. R. (2021). Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Struktur Organisasi Terhadap Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banjar. *Kindai*, 17(3), 362–372. <https://doi.org/10.35972/kindai.v17i3.620>
- Kemenkes. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia*.
- Nurlaela, A. N. (2020). *Membaca Aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Dan Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Cilacap*. 11(2), 37–43.
- Perda Kota Samarinda. (2017). Peraturan Derah Kota Sanrinda Nomor 8 tahun 2017. *Peraturan Daerah Kota Samarinda*, 6. <http://repository.ucb.ac.id/id/eprint/601>
- Puskesmas. (2023). *Data Skring Perokok Remaja Puskemas Bengkuring*.
- Putri, K. D., & Rusli, Z. (2021). *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau*. 7(2), 165–175. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(2\).7439](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(2).7439)
- Putri, N. E., Ilmu, J., Negara, A., Padang, U. N., Ilmu, J., Negara, A., & Padang, U. N. (2020). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*. 2(4), 78–84.
- Raimah, R., & Irawanto, I. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Uin Antasari Banjarmasin. *Administraus*, 4(1), 1–26. <https://ejournal.stiabinabuabjm.ac.id/index.php/administraus/article/view/86%0Ahttps://ejournal.stiabinabuabjm.ac.id/index.php/administraus/article/download/86/64>
- Riswandi, A. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas. *Gunahumas*, 3(1), 71–92. <https://doi.org/10.17509/ghm.v3i1.28403>
- Rohmah, N., Ivanka, A., Dewi, E., Juhrie, G. I., Inanda, Z., Anggraini, D., & Priyanti, A. D. (2023). *Social Marketing Research : The impact of anti-smoking social advertising on knowledge levels via Instagram Stories*. 16(3), 145–151.
- Suwarta. (2020). Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber-Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terhadap Efektivitas Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Teed, J. A., Robichaud, M. O., Duren, M., Gouda, H. N., & Kennedy, R. D. (2024). State of the literature discussing smoke-free policies globally: A narrative review. *Tobacco Induced Diseases*, 22, 1–17. <https://doi.org/10.18332/tid/174781>
- Vanocy, D. S., & Rafiee, S. A. K. (2022). Analisis Implementasi Sistem Informasi Data Korporasi Jasa Raharja (DASI-JR) Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai PT Jasa Raharja Perwakilan Meulaboh. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(1), 079–089. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i1.4575>
- WHO. (2020). *World Health Organization*.
- Yuri, I. M., Widodo, M. D., Abidin, Z., Hanafi, A., & Kamal, Y. (2022). *Implementasi Kepatuhan Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Di Puskesmas Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*. 1(2).